

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRACT	xv
INTISARI	xvi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	15
1.3 Pertanyaan Penelitian	16
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Tujuan Penelitian	16
1.4.2 Manfaat Penelitian	17
BAB II Tinjauan Pustaka	18
2.1 <i>Policy Gridlock</i>	18
2.1.1 Definisi <i>Policy Gridlock</i>	18
2.1.2 Tipologi <i>Policy Gridlock</i>	19
2.1.3 Sejarah Perkembangan Riset <i>Policy Gridlock</i>	26
2.1.4 Riset <i>Policy Gridlock</i> di Indonesia	29
2.2 <i>Multiple Stream Aproach</i> Dalam Proses Pengambilan Kebijakan	32
2.2.1 Proses Perumusan Kebijakan	33
2.2.2 Definisi dan konsep <i>Multiple Stream Aproach</i> (MSA)	36
2.2.3 Arus Masalah	40
a. Arus Masalah Pada Pendekatan Multiple Stream	40
b. Arus Masalah dan Pendekatan Teknokratis	41
2.2.4 Arus Kebijakan	42
a. Arus Kebijakan Pada Pendekatan Multiple Stream	42

b. Arus Kebijakan, Pendekatan Partisipatif dan Pendekatan Bottom-Up.....	43
2.2.5 Arus Politik	44
a. Arus Politik Pada Pendekatan Multiple Stream	44
b. Arus Politik, Pendekatan Politik dan Kebijakan Publik	45
c. Aktor Politik, Sistem Pemilu dan Perilaku Aktor Politik	46
2.2.6 <i>Entrepreneur</i> Kebijakan	48
2.3 Kerangka Konseptual	50
 BAB III Metode Penelitian	52
3.1 Pendekatan dan jenis penelitian	52
3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian	53
3.2.1 Lokasi Penelitian	53
3.2.2 Fokus Penelitian	54
3.2.3 Defenisi Konsep dan Operasional	54
3.3 Informan Penelitian	56
3.4 Proses Pengumpulan Data	58
3.5 Teknik Analisis Data	58
3.6 Sistematika Penulisan	60
 BAB IV <i>Policy Gridlock</i> Dalam Perumusan Dan Penetapan APBD Provinsi Riau Tahun 2014-2019	62
4.1 Perumusan Kebijakan Anggaran Pada Penyusunan Dokumen RKPD	62
4.1.1 Proses Teknokratis Dalam Perumusan Permasalahan	63
4.1.2 Pemangku Kepentingan Serta Gagasan dalam Forum Pembahasan Perencanaan.....	76
a. Seluruh Pemangku Kepentingan Pada Pembahasan Perencanaan	76
b. Aspirasi dan Usulan Pada Pembahasan Perencanaan	85
4.1.3 Aspek Politis Pada Proses Perumusan Kebijakan Perencanaan	92
a. Suasana dan Kondisi Publik	92
b. Kondisi Pemerintahan dan Birokrasi	94

c. Tekanan Politik	96
4.1.4 Forum Pembahasan Pada Kebijakan Perencanaan	100
a. Pembahasan Konsultasi Publik	101
b. Pembahasan Forum Perangkat Daerah	104
c. Pembahasan Pra Musrenbang dan Musrenbang	110
d. Pembahasan Rancangan Akhir	117
4.2 Perumusan Kebijakan Anggaran Pada Pembahasan KUA PPAS	
Dan Ranperda APBD	121
4.2.1 Jadwal dan Pelaksanaan Pembahasan KUA PPAS dan	
Ranperda APBD Provinsi Riau	121
4.2.2 Keterlambatan Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun 2014 ...	127
4.2.3 Dinamika Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun 2015	130
4.2.4 Keterlambatan Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun 2016 ...	131
4.2.5 Keterlambatan Pembahasan Perumusan APBD	
Tahun 2017-2019	133
 BAB V Konflik Pembahasan dan Penetapan Kebijakan Anggaran	135
5.1 Latar Belakang Pembentuk Konflik Pada Perumusan	
Kebijakan Anggaran	135
5.1.1 Aspek Teknokratis Sebagai Pedoman Penyusunan	
Kebijakan APBD	136
5.1.2 Aspek Politis Untuk Menjaga Akuntabilitas Politik Serta	
Kepentingan Elektoral	138
a. Struktur Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik	138
b. Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah dan DPRD	
di Indonesia	140
c. Sistem Pemilihan Umum Pembentuk Perilaku Aktor Politik	
Dalam Perumusan Kebijakan	148
d. Struktur Pemerintah Provinsi Riau Tanpa Dukungan	
Mayoritas DPRD	153
e. Alokasi Prioritas Gubernur dan Pokir DPRD Untuk	
Kepentingan Akuntabilitas Politik dan Elektoral.....	157

5.2 Konflik Pembahasan Pada Kebijakan APBD Provinsi Riau	
Tahun 2014-2019	170
5.2.1 Ketidakstabilan Pemerintah Penyebab Keterlambatan	
APBD Tahun 2014.....	170
5.2.2 Transaksi Pemberian Hadiah Demi Percepatan Pembahasan	
APBD Tahun 2015	174
5.2.3 Kewaspadaan Pemerintah Berdampak Kepada Keterlambatan	
APBD Tahun 2016	177
5.2.4 Transaksi Kepentingan Penyebab Lancarnya Pembahasan	
APBD Tahun 2017-2019	186
5.2.5 Bentuk Konflik Perumusan Kebijakan APBD	
Tahun 2017-2019	191
 BAB VI Peran Gubernur Dalam Perumusan Dan Penetapan	
Kebijakan Anggaran.....	198
6.1 Dinamika Penyelesaian Perumusan Kebijakan APBD	
Tahun 2014-2019	199
6.2 Petunjuk Serta Arahan Gubernur Dalam Penyelesaian Pembahasan	
Dan Penetapan Kebijakan APBD	209
6.3 Gubernur Merupakan <i>Policy Entrepreneur</i> Dalam Perumusan	
Dan Penetapan APBD di Provinsi Riau	217
6.4 Kebaharuan (<i>Novelty</i>)	222
 BAB VII Penutup	227
7.1 Kesimpulan	227
7.2 Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Masa Depan	230
7.3 Kontribusi Penelitian dan Implikasi Praktis	231
7.3.1 Kontribusi Penelitian	231
7.3.2 Implikasi Praktis	234
 DAFTAR PUSTAKA	xvii